

LAPORAN AKSI PERUBAHAN KINERJA ORGANISASI

**OPTIMALISASI PEMANFAATAN DATA PADA SISTEM INFORMASI
MONITORING PRODUK HEWAN DALAM IMPLEMENTASI
KEBIJAKAN TEKNIS PERKARANTINAAN PRODUK HEWAN**



OLEH:

DRH. ISWAN HARYANTO, M.Si.

NIP. 19751127203121001

PELATIHAN KEPEMIMPINAN ADMINISTRATOR (PKA)

ANGKATAN I

KEMENTERIAN PERTANIAN

BADAN PENYULUHAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA PERTANIAN

PUSAT PELATIHAN MANAJEMEN DAN KEPEMIMPINAN PERTANIAN

CIAWI - BOGOR

2020

LEMBAR PENGESAHAN

JUDUL : OPTIMALISASI PEMANFAATAN DATA PADA SISTEM INFORMASI MONITORING PRODUK HEWAN DALAM IMPLEMENTASI KEBIJAKAN TEKNIS PERKARANTINAAN PRODUK HEWAN

NAMA : DRH. ISWAN HARYANTO, M.Si.

NIP : 197511272003121001

UNIT KERJA : BADAN KARANTINA PERTANIAN

Telah diuji di depan penguji pada hari selasa tanggal 23 Juni 2020

Mentor

Pembimbing

Drh. Agus Sunanto, M.P.

Ir. Rhodiyah, M.M.

NIP. 196202051992031002

NIP. 195601271983032002

Penguji

DR. Ir. Widi Hardjono, M.Sc.

NIP. 195812011987031001

KATA PENGANTAR

Puji syukur penulis panjatkan ke hadirat Allah SWT yang telah melimpahkan berkah dan rahmat kepada penulis sehingga dapat menyelesaikan Laporan Aksi Perubahan Kinerja Organisasi dengan judul “Optimalisasi Pemanfaatan Data Sistem Informasi Monitoring Produk Hewan dalam Implementasi Kebijakan Teknis Perkarantinaan Produk Hewan” sesuai waktu. Aksi Perubahan Kinerja Organisasi merupakan suatu pembelajaran bagi penulis dalam merancang aksi perubahan dalam meningkatkan kinerja organisasi dengan berbagai terobosan dan inovasi. Kegiatan ini merupakan salah satu implementasi pembelajaran penulis selama mengikuti Pelatihan Kepemimpinan Administrator di bawah bimbingan dan arahan oleh mentor dan coach serta akan disajikan pada Seminar Aksi Perubahan Kinerja Organisasi untuk mendapatkan masukan dan perbaikan.

Pada kesempatan ini penulis mengucapkan terimakasih yang sebesar-besarnya kepada yang terhormat Ibu Ir. Rodhiyah, MM. Widyaiswara Ahli Utama selaku *coach* yang telah memberikan bimbingan pada saat melakukan pembelajaran, maupun pada saat penulis melaksanakan studi lapangan dan sekaligus melakukan penulisan Rancangan Aksi Perubahan Kinerja Organisasi pelaksanaan Aksi Perubahan hingga penulisan Laporan Aksi Perubahan Kinerja Organisasi ini selesai ditulis, juga kepada Bapak Drh. Agus Sunanto, M.P. Kepala Pusat Karantina Hewan dan Keamanan Hayati Hewani selaku mentor yang memberikan kesempatan kepada penulis untuk bisa mengikuti pelatihan ini, dan memberikan arahan dalam penyusunan rancangan, pelaksanaan maupun saat penulisan Laporan Aksi Perubahan Kinerja Organisasi, serta kepada Bapak Dr. Ir. Widi Hardjono, M.Sc. selaku penguji pada seminar Aksi Perubahan Kinerja Organisasi.

Penulis berharap Aksi Perubahan Kinerja Organisasi ini akan dapat diterima dan dilaksanakan dengan baik, serta memberikan kontribusi nyata dalam peningkatan kinerja organisasi di tempat penulis bertugas saat ini.

Jakarta , 23 Juni 2020
Penulis,

Iswan Haryanto

DAFTAR ISI

LEMBAR PENGESAHAN.....	2
KATA PENGANTAR.....	3
DAFTAR ISI.....	4
DAFTAR GAMBAR.....	6
DAFTAR TABEL.....	7
DAFTAR LAMPIRAN.....	8
BAB I . PENDAHULUAN.....	9
A. Latar Belakang.....	9
B. Area dan Fokus.....	9
C. Tujuan Aksi Perubahan.....	9
D. Manfaat Aksi Perubahan.....	9
E. Adopsi dan Adaptasi Hasil Studi Lapang.....	10
BAB II. PROFIL KINERJA PELAYANAN.....	11
A. Tugas Pokok dan Fungsi Organisasi.....	11
B. Kinerja Organisasi Sekarang.....	11
C. Kinerja Organisasi yang Diharapkan.....	11
BAB III. ANALISIS MASALAH.....	13
A. Masalah yang Ada.....	13
B. Penyebab Masalah.....	13
C. Akar Penyebab Masalah.....	14
D. Alternatif Solusi Mengatasi Masalah.....	15
E. Solusi Mengatasi Masalah	17
BAB IV. STRATEGI PENYELESAIAN MASALAH.....	18
A. Terobosan/Inovasi.....	18
B. Tahapan Kegiatan.....	18
C. Sumber Daya (Peta dan Pemanfaatan).....	19
D. Manajemen Risiko.....	23

BAB V. PELAKSANAAN AKSI PERUBAHAN.....	24
A. Deskripsi Proses Kepemimpinan.....	24
B. Deskripsi Hasil Kepemimpinan.....	25
C. Keberlanjutan Aksi Perubahan.....	25
BAB VI. PENUTUP.....	27
LAMPIRAN.....	29

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1.....	21
---------------	----

DAFTAR TABEL

Tabel 1.....	13
Tabel 2.....	16

DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1.....	29
Lampiran 2.....	30
Lampiran 3.....	31
Lampiran 4.....	32
Lampiran 5.....	33
Lampiran 6.....	36
Lampiran 7.....	37
Lampiran 8.....	38
Lampiran 9.....	39
Lampiran 10.....	40

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Pelaksanaan tugas dan fungsi di Bidang Karantina Produk Hewan dalam membuat kebijakan perkarantinaan produk hewan merupakan tugas yang harus diselesaikan dengan baik untuk dapat digunakan dalam organisasi besar Pusat Karantina Hewan dan Keamanan Hayati Hewani. Pengambilan keputusan dan kebijakan harus didukung dengan adanya data dan informasi yang cepat dan akurat untuk mendapatkan hasil yang terbaik

B. Area Dan Fokus

Area yang ditetapkan dalam pembuatan aksi perubahan kinerja organisasi ini mengacu pada delapan area perubahan reformasi birokrasi yaitu pada area Mental Aparatur berupa terciptanya budaya kerja yang positif dilaksanakan pada saat melaksanakan monitoring produk hewan yang dilaksanakan secara rutin dan dilaporkan secara realtime oleh UPTKP sehingga bisa dianalisis oleh pegawai di lingkup Bidang Karantina Produk Hewan, kemudian pada area Tata Laksana dimana sistem dan proses serta prosedur kerja yang efektif dan efisien, terukur, dan sesuai dengan prinsip-prinsip *good governance*. Dan area Akuntabilitas dengan adanya peningkatan kapasitas dan akuntabilitas kinerja birokrasi. Serta pada area Pelayanan Publik yang dituntut bahwa kita harus melaksanakan pelayanan prima terhadap kebutuhan masyarakat dalam hal pembuatan kebijakan perkarantinaan produk hewan.

Fokus dari aksi perubahan kinerja organisasi yang dibahas dalam tulisan ini adalah area Tata Laksana, dimana sistem monitoring produk hewan menjadi lebih jelas, efisien dan efektif dalam hal pelaksanaan dan terukur perubahannya, sehingga akan memberikan kontribusi terhadap kinerja Bidang Karantina Produk Hewan.

C. Tujuan Aksi Perubahan

Tujuan yang ingin dicapai dalam aksi perubahan adalah peningkatan kecepatan dan keakuratan data monitoring produk hewan dari UPT melalui penerapan sistem informasi monitoring produk hewan berbasis web

D. Manfaat Aksi Perubahan

Manfaat dari aksi perubahan adalah didapatkannya data monitoring secara *realtime* untuk dapat digunakan sebagai penentuan kebijakan perkarantinaan dan kesehatan hewan secara luas.

E. Adopsi Dan Adaptasi Hasil Studi Lapangan

Penulis melaksanakan studi lapangan di Balai Embrio Ternak Cipelang (BET Cipelang), dengan menggunakan pembelajaran secara jarak jauh dan menggali melalui website BET Cipelang di alamat: <http://betcipelang.ditjenpkh.pertanian.go.id> sebagai acuan utama dan melakukan wawancara serta pertemuan secara daring. Hasil adopsi dan adaptasi penulis dalam masa studi lapangan didapatkan bahwa sebagai organisasi dengan tingkat eselon III Bidang Karantina Produk Hewan memiliki tugas dan fungsi yang sangat berbeda dengan BET Cipelang. Dimana Bidang Karantina Produk Hewan merupakan organisasi di bawah Pusat Karantina Hewan dan Keamanan Hayati Hewani yang berfungsi sebagai penyusun kebijakan teknis, memberikan bimbingan teknis, pemantauan dan evaluasi pelaksanaan perkarantinaan produk hewan. Sedangkan BET Cipelang adalah organisasi dalam bidang pelayanan publik yang memiliki tugas pokok melaksanakan produksi, pengembangan dan distribusi embrio ternak. Digitalisasi pelayanan yang dilakukan oleh BET Cipelang merupakan salah satu hal positif yang menjadi keunggulan, dengan kondisi yang cukup jauh dari lokasi keramaian, namun tetap mampu memberikan pelayanan dengan prima. Bahkan pada saat penulis melakukan studi lapangan di BET Cipelang, cukup melalui web saja sudah mampu menunjukkan keunggulan kinerja dari BET Cipelang dalam pelayanan terhadap seluruh stakeholdernya.

Hasil adaptasi yang dilakukan penulis terhadap digitalisasi yang dilakukan oleh BET Cipelang adalah dengan membuat aplikasi berbasis web yang mampu menunjukkan peningkatan kinerja disesuaikan dengan tugas pokok dan fungsi Bidang Karantina Produk Hewan, yaitu menyusun kebijakan perkarantinaan produk hewan. Dengan adanya sebuah sistem yang mampu mengumpulkan data yang akurat dan cepat (*realtime*) akan memudahkan dalam pengambilan kebijakan yang tepat dan kekinian.

BAB II

PROFIL KINERJA PELAYANAN

A. Tugas Pokok Dan Fungsi Organisasi

Berdasar pada Peraturan Menteri Pertanian Republik Indonesia Nomor: 43/Permentan/Ot.010/8/2015 Tentang Organisasi Dan Tata Kerja Kementerian Pertanian, Bidang Karantina Produk Hewan memiliki tugas melaksanakan penyusunan kebijakan teknis, pemberian bimbingan teknis, pemantauan dan evaluasi pelaksanaan perkarantinaan produk hewan, dengan fungsi sebagai berikut:

1. Penyiapan penyusunan kebijakan teknis, pemberian bimbingan teknis dan evaluasi pelaksanaan perkarantinaan, serta analisis risiko hama penyakit hewan karantina produk hewan impor
2. Penyiapan penyusunan kebijakan teknis, pemberian bimbingan teknis dan evaluasi pelaksanaan perkarantinaan, serta analisis risiko hama penyakit hewan karantina produk hewan ekspor dan antar area.

B. Kinerja Organisasi Sekarang

Kinerja Bidang Karantina Produk Hewan berdasarkan area dan fokus yang telah ditetapkan dalam aksi perubahan, yaitu dalam melaksanakan kegiatan monitoring terhadap lalu lintas produk hewan di tempat pemasukan dan pengeluaran dilaksanakan secara berkala setiap tahun dalam sebuah kerangka kegiatan seminar monitoring produk hewan yang menjadi agenda tahunan di Pusat Karantina Hewan dan Keamanan Hayati Hewani. Kegiatan ini melibatkan seluruh Unit Pelaksana Teknis Karantina Pertanian (UPTKP) di seluruh Indonesia untuk dapat disajikan dan dikaji bersama-sama dengan para ahli dan seluruh pejabat di lingkup Pusat Karantina Hewan. Hasil dari kajian tersebut akan ditindaklanjuti untuk kemudian menjadi bahan penyusunan kebijakan Pusat Karantina Hewan khususnya dalam bidang perkarantinaan produk hewan.

C. Kinerja Organisasi Yang Diharapkan

Pelaksanaan aksi perubahan kinerja organisasi ini diharapkan akan dapat membuat perubahan dalam proses pengumpulan data dari UPTKP di seluruh Indonesia yang semula menggunakan media tertulis yang membutuhkan waktu lama menjadi lebih cepat dalam melaksanakan input data, melakukan rekapitulasi, hingga mengirimkan data tersebut secara tertulis ke kantor pusat, untuk kemudian dilakukan rekapitulasi oleh pusat untuk dikelompokkan sesuai kebutuhan secara manual, dikaji dan disampaikan pada pimpinan sebagai bahan untuk pembuatan kebijakan perkarantinaan produk hewan,

Pelaporan monitoring yang dilakukan oleh UPTKP juga selain menggunakan prinsip kecepatan dan keakuratan, juga memperhatikan prinsip

kemudahan dalam akses, karena aplikasi ini berbasis web dan bisa diakses dari mana saja selama memiliki akses internet dan memiliki akun sebagai pengguna. Penghematan terhadap penggunaan tinta dan kertas merupakan aspek yang tidak kalah penting, karena dalam penyampaian pelaporan tidak diperlukan pencetakan kertas dan memerlukan tinta, sehingga turut berkontribusi terhadap terwujudnya *green government*.

BAB III ANALISIS MASALAH

A. Permasalahan yang Ada

Berdasar pada tugas pokok dan fungsi organisasi Bidang Karantina Produk Hewan, dapat ditemukan beberapa masalah dalam pelaksanaan tugas dan fungsi bidang tersebut dan berpotensi menghambat kinerja Bidang Karantina Produk Hewan, antara lain:

1. Terhambatnya proses penyusunan kebijakan teknis perkarantinaan produk hewan.
2. Pemberian bimbingan teknis perkarantinaan produk hewan tidak bisa dilaksanakan dengan baik
3. Pelaksanaan evaluasi pelaksanaan perkarantinaan produk hewan tidak bisa dilakukan dengan optimal
4. Pelaksanaan analisis risiko hama penyakit hewan karantina produk hewan tidak optimal

B. Penyebab Masalah

Penyebab permasalahan yang telah disebutkan di atas, harus diprioritaskan untuk dapat diselesaikan penyebab utamanya. Sehingga dengan menggunakan teknik USG kita dapat memprioritaskan permasalahan tersebut sebagaimana dalam tabel 1. Urgensi adalah seberapa mendesak isu tersebut harus dibahas, dikaitkan dengan waktu yang tersedia dan seberapa keras tekanan waktu tersebut untuk memecahkan masalah penyebab isu tadi. *Seriousness* adalah keseriusan dari isu tersebut dikaitkan dengan akibat yang akan timbul jika ada penundaan, atau akan muncul masalah-masalah lain jika tidak dilakukan segera. *Growth* adalah seberapa kemungkinan isu tersebut berkembang menjadi lebih buruk, jika dibiarkan, apalagi jika dikaitkan dengan penyebab masalah lain.

Tabel 1. Prioritas Masalah

No	Permasalahan	U	S	G	RANGKING
1	Terhambatnya proses penyusunan kebijakan teknis perkarantinaan produk hewan	5	5	5	I
2	Pemberian bimbingan teknis perkarantinaan produk hewan tidak bisa dilaksanakan dengan baik	5	4	5	II

3	Pelaksanaan evaluasi pelaksanaan perkarantinaan produk hewan tidak bisa dilakukan dengan optimal	5	4	4	III
4	Pelaksanaan analisis risiko hama penyakit hewan karantina produk hewan tidak optimal	5	4	3	IV

Keterangan:

5 = Sangat Besar

4 = Besar

3 = Sedang

2 = Kecil

1 = Sangat Kecil

Berdasarkan pada tabel 1. didapatkan hasil bahwa masalah berupa terhambatnya proses penyusunan kebijakan teknis perkarantinaan produk hewan merupakan masalah yang prioritas, sehingga memerlukan penanganan yang segera. Berbagai data teknis yang harus segera dilaporkan ke pusat oleh UPT tidak dilaporkan karena belum ada sistem yang dibentuk dan memerlukan waktu lama untuk ditindaklanjuti menunggu adanya seminar monitoring produk hewan yang dilakukan setiap tahun satu kali. Hal ini memberikan potensi masalah karena kebijakan teknis yang akan disusun harus berdasarkan pada data teknis yang didapatkan dari hasil monitoring yang dilakukan oleh UPT.

C. Akar Penyebab Masalah

Pencarian akar masalah dapat dilakukan dengan menggunakan *fishbone diagram* dan akhirnya disusun kategori sebagai sumber permasalahan dan tiap kategori memiliki keterkaitan dengan kategori lainnya. Kategori-kategori tersebut adalah:

1. Manusia

Sebagai penyebab pertama adalah manusia karena yang menggerakkan keseluruhan proses dalam penyusunan kebijakan adalah manusia. Sehingga bisa menjadi faktor penyebab ketidakefektifan penyusunan kebijakan ini. Faktor-faktor dalam kategori ini antara lain:

- a. Kurangnya jumlah penyusun kebijakan karena terbatasnya jumlah rekrutmen pegawai
- b. Penyusun kebijakan melakukan penyusunan beberapa kebijakan sekaligus

2. Proses

Proses merupakan suatu kategori yang memberikan kontribusi tidak optimal dalam penyusunan kebijakan. Dengan tidak adanya pertemuan/rapat karena terbatasnya waktu, atau tidak efektifnya sebuah rapat/pertemuan/diskusi

3. Informasi

Informasi menjadi faktor karena dalam penyampaian data dari UPT yang membutuhkan waktu relatif lama, dalam pengumpulan data ini membutuhkan waktu sekitar satu tahun untuk bisa mengetahui kejadian, sehingga tidak kekinian dalam pengambilan kebijakan.

4. Lingkungan

Lingkungan kerja menjadi faktor ketidakefektifan sebuah proses penyusunan kebijakan karena lokasi para penyusun yang tidak dalam satu ruangan tertentu, sehingga memberikan waktu dalam perpindahan proses pengambilan keputusan dari satu lokasi ke lokasi lain dimana pegawai berada.

5. Peralatan

Tidak optimalnya sebuah proses penyusunan dapat juga dikarenakan oleh peralatan penunjang yang memudahkan penyusun dalam mencari data, mengolah data dan menyajikan informasi/konsep kebijakan perkarantinaan produk hewan. Faktor pada kategori peralatan ini dapat berupa:

- a. Kerusakan peralatan pendukung membuat terhambatnya sebuah proses penyusunan kebijakan (komputer, printer, scanner, proyektor, dan lain sebagainya).
- b. Kerusakan alat pendukung juga memerlukan waktu penyelesaian sehingga harus menunggu peralatan pengganti atau menunggu perbaikan selesai dilakukan.

6. Kebijakan

Kebijakan merupakan obyek dari analisis ini dan memberikan kontribusi ketidakefektifan penyusunan kebijakan, meliputi:

- a. Jumlah kebijakan yang disusun cukup banyak
- b. Variasi tingkat kesulitan dalam penyusunan kebijakan
- c. Kebijakan yang disusun tidak spesifik

D. Alternatif Solusi Mengatasi Masalah

Dari berbagai permasalahan yang muncul dilakukan penentuan sebagai akar masalah sekaligus dengan alternatif solusi sebagaimana tercantum dalam Tabel 2.

Tabel 2. Alternatif Solusi dan Akar Masalah

Kemungkinan akar masalah	Alternatif solusi	Akar masalah
Manusia		
Kurangnya jumlah penyusun kebijakan (pegawai)	Kebutuhan pegawai harus disediakan	Ya
penyusunan beberapa kebijakan sekaligus dalam waktu yang bersamaan	Pembagian dan pengaturan sesuai tingkat kesulitan dan banyaknya kebijakan yang akan disusun disesuaikan dengan kompetensi penyusun	Tidak
Tidak ada tenaga ahli	Kerjasama atau berkonsultasi dengan tenaga ahli yang memahami penyusunan kebijakan dan teknis substansi	Ya
Proses		
Proses pembuatan kebijakan tidak berjalan dengan baik	Pengaturan waktu diskusi/pertemuan/rapat	Tidak
Informasi		
Dibutuhkan waktu yang lama dalam menghimpun data/laporan monitoring dari UPT	Perlu pembuatan sistem informasi yang cepat, mudah dapat diaplikasikan	Ya
Lingkungan		
Tidak memiliki lokasi yang sama	Menggunakan teknologi informasi	Tidak
Peralatan		
Kerusakan peralatan	Menyediakan peralatan dalam kondisi baik	Tidak
Waktu perbaikan	Menggunakan peralatan pengganti dalam kondisi baik	Tidak
Kebijakan		
Jumlah kebijakan	Dilakukan penjadwalan sekaligus melakukan antisipasi terhadap kebijakan strategis yang urgent	Ya
Variasi tingkat kesulitan	Memberikan penugasan penyelesaian pada pejabat yang sesuai dengan tingkat kesulitan	Tidak
Kebijakan yang tidak spesifik	Meningkatkan kompetensi penyusun, meningkatkan pemahaman terhadap arahan pimpinan, dll	Tidak

Dengan adanya tabel alternatif solusi dan akar masalah pada poin D, bisa disimpulkan bahwa yang menjadi akar masalah adalah:

1. Kurangnya jumlah penyusun kebijakan
2. Tidak ada tenaga ahli yang memahami teknis dan penyusunan kebijakan secara detail
3. Dibutuhkan waktu yang lama dalam menghimpun laporan/data monitoring dari UPTKP
4. Banyaknya jumlah kebijakan yang harus disusun.

E. Solusi Mengatasi Masalah

Berdasarkan pada kesimpulan dan alternatif solusi didapatkan bahwa semua akar masalah akan mendapatkan alternatif solusi yang rasional, dan mengingat bahwa alternatif solusi harus berada dalam kewenangan Bidang Karantina Produk Hewan, maka dapat ditentukan bahwa akar masalah untuk menghimpun data/laporan monitoring dari UPT membutuhkan waktu yang relatif lama memiliki solusi yang berada dalam kewenangan Bidang Karantina Hewan dan menjadi prioritas dalam penyelesaian masalah. Sehingga diharapkan dengan peningkatan kecepatan pengumpulan data yang akurat dan menyajikan data dan informasi tersebut dengan baik akan mampu menjadi solusi yang mengatasi masalah di atas.

BAB IV

STRATEGI PENYELESAIAN MASALAH

A. Terobosan/Inovasi

Dalam penyusunan kebijakan yang selalu *up to date/kekinian*, diperlukan data yang konkret dan *realtime*. Sehingga diperlukan sebuah alat untuk dapat mengumpulkan data agar lebih cepat dilaporkan kepada pimpinan, jenis data yang dapat diakses lebih banyak jenisnya sesuai dengan jenis komoditas/Media Pembawa Hama dan Penyakit Hewan Karantina berupa produk hewan yang dilakukan monitoring saat dilalulintaskan melalui tempat-tempat pemasukan dan pengeluaran yang telah ditetapkan oleh Pemerintah. Sebuah sistem informasi berbasis web harus dibangun dengan mengakomodir kebutuhan-kebutuhan berupa akurasi data, kecepatan akses, adanya fitur peringatan/*alert* dalam kejadian yang di luar standar yang telah ditetapkan, serta adanya fitur laporan khusus untuk pimpinan (*executive summary*) akan menjadikan sistem ini dapat lebih mudah dan cepat untuk diakses oleh seluruh pengguna sesuai kewenangannya.

B. Tahapan Kegiatan

Tahap I dilaksanakan dalam kurun waktu dua bulan. Dimulai dari bulan Mei hingga Juni Tahun 2020. Pelaksanaan tahap I akan terdiri dari beberapa sub kegiatan sebagai berikut:

1. Membuat tim kerja
 - a. Identifikasi personel tim kerja
 - b. Pengenalan maksud dan tujuan kepada tim kerja
 - c. Sosialisasi pada pihak yang terlibat dalam aksi perubahan
 - d. Pembuatan tim kerja
2. Perancangan dan penyusunan
 - a. Identifikasi sarana dan prasarana yang diperlukan
 - b. Perancangan pembuatan aplikasi berbasis web
 - c. Penyusunan aplikasi berbasis web
 - d. Penyusunan user guide
 - e. konsultasi
3. Uji coba
 - a. Sosialisasi program pada UPTKP dengan lalulintas komoditas yang tinggi
 - b. Persiapan hardware dan software serta jaringan telekomunikasi di UPTKP
4. Pelaksanaan
 - a. Memasukkan rata monitoring dari UPTKP
 - b. Penarikan data monitoring
 - c. Penyajian data monitoring
 - d. Penggunaan data monitoring oleh pimpinan

Tahap II dilaksanakan setelah tahap I selesai dilakukan dan dilanjutkan dengan tahap ini. Pelaksanaan tahap II ini direncanakan untuk dapat terlaksana hingga bulan Desember 2020. Dengan tahapan sub kegiatan sebagai berikut:

1. Evaluasi dan perbaikan Tahap I
2. Penambahan konten
 - a. Penyusunan konten tambahan berupa jenis komoditas
 - b. Penyusunan konten tambahan berupa jenis pengujian
3. Penambahan jumlah UPT tahap II
4. Pelaksanaan Tahap II
 - a. Memasukkan data monitoring dari UPTKP
 - b. Penarikan data monitoring
 - c. Penyajian data monitoring
 - d. Penggunaan data monitoring oleh pimpinan

Tahap III merupakan tahap jangka panjang yang dilaksanakan setelah tahap II selesai dilaksanakan. Ada konsep besar termasuk dalam rencana jangka panjang ini berupa kontribusi sistem informasi ini terhadap pembuatan peta penyakit hewan secara nasional, dalam rangka kemudahan pelaksanaan tindakan karantina hewan di masa yang akan datang. Sub kegiatan dalam tahap ini adalah sebagai berikut:

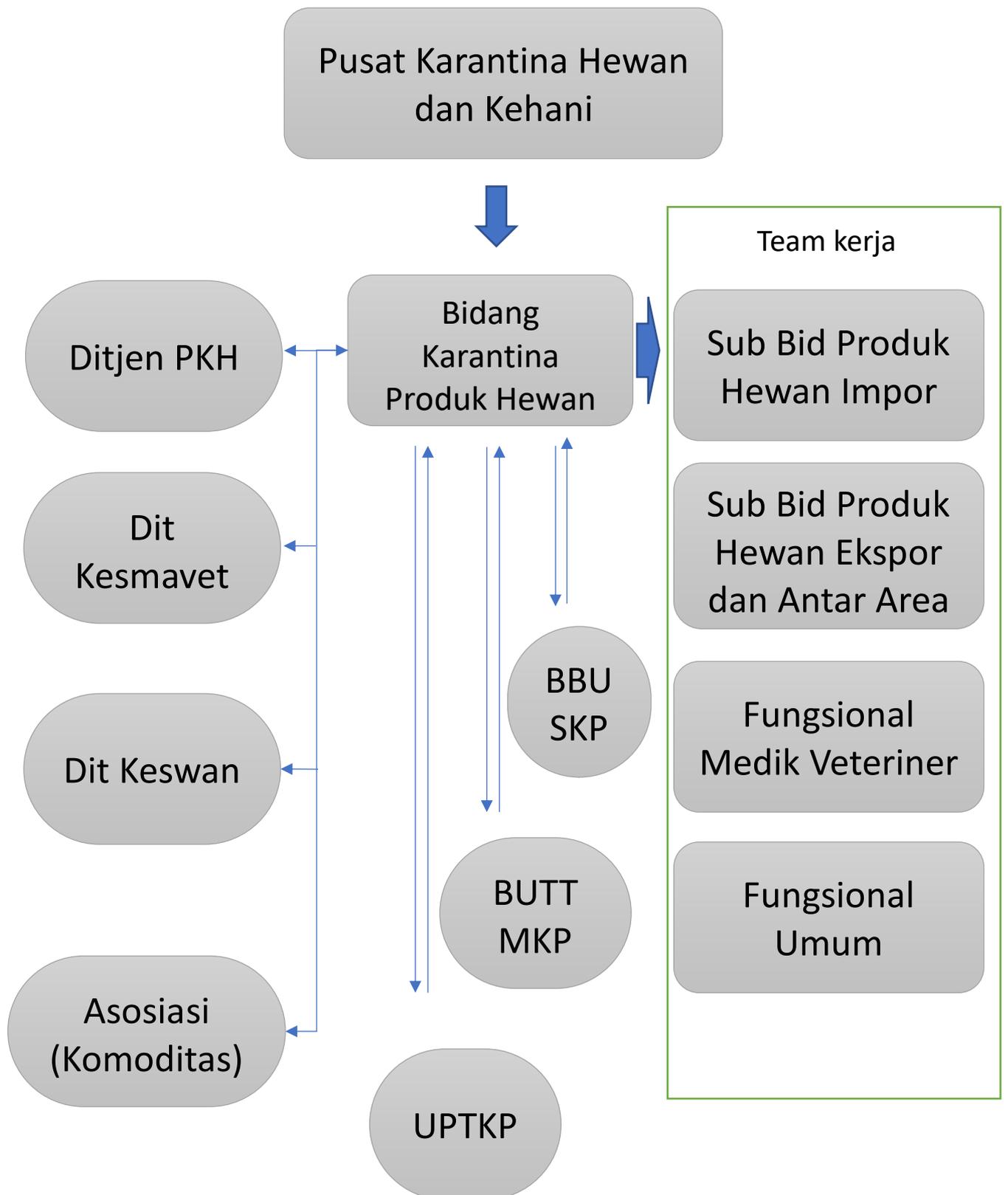
1. Evaluasi dan perbaikan Tahap II
2. Penambahan menu/konten
 - a. Penyusunan konten tambahan komoditas
 - b. Penyusunan konten tambahan pengujian
 - c. Penyusunan konsep pembuatan peta penyakit (terhubung dengan sistem lain)
3. Pelaksanaan Tahap III
 - a. Memasukkan data monitoring dari UPT
 - b. Penarikan data monitoring
 - c. Penyajian data monitoring
 - d. Penggunaan data monitoring oleh pimpinan

C. Sumberdaya (Peta dan Pemanfaatan)

Sumberdaya organisasi memegang peran penting dengan memberikan dukungan secara penuh terhadap rancangan aksi perubahan ini agar menjadi sempurna. Adapun Peta Sumberdaya Bidang Karantina Produk Hewan adalah sebagai berikut:

1. Manusia
 - a. Tim Kerja
Bidang Karantina Produk Hewan memiliki 11 orang personel yang terdiri dari:
 - Satu orang Kepala Bidang
 - Dua orang Kepala Subbidang
 - Satu orang pejabat fungsional arsiparis
 - Satu orang pejabat fungsional umum

- Dua orang pejabat fungsional paramedik
 - Satu orang pejabat fungsional medik muda
 - Tiga orang pejabat fungsional medik madya
- b. Tim Pendukung
Terdiri dari satu orang Ahli IT dan seluruh user yang ditunjuk sebagai admin dari masing-masing UPTKP
2. Anggaran
Anggaran disediakan berdasarkan pada perencanaan ataupun optimalisasi anggaran tercantum dalam DIPA Barantan T.A. 2020
3. Peralatan
- a. Software dalam membuat aplikasi berbasis web
 - b. Hardware berupa peralatan computer lengkap dengan printer dan scanner
 - c. Jaringan internet dan host dalam pembuatan aplikasi
4. Metoda
- a. SOP Penyusunan Kebijakan
 - b. SOP Monitoring Produk Hewan
5. Jejaring Kerja Bidang Karantina Produk Hewan
- a. Di bawah komando Pusat Karantina Hewan dan Kehani, Bidang Karantina Produk hewan menyiapkan bahan kebijakan terkait produk hewan dengan dibantu oleh tim kerja
 - b. Tim Kerja terdiri dari Sub Bidang Produk Hewan Impor, Sub Bidang Produk Hewan Ekspor dan Antar Area, Fungsional Medik Veteriner dan Fungsional Umum
 - c. Bidang Karantina Produk Hewan menyusun bahan kebijakan sehingga akan melaksanakan koordinasi dengan pihak terkait antara lain Direktorat Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan, Direktorat Pakan, Direktorat Kesehatan Masyarakat Veteriner, Direktorat Kesehatan Hewan, Balai Besar Penelitian Veteriner, dan lain sebagainya.
 - d. Bidang Karantina Produk Hewan dalam menyusun bahan kebijakan perkarantinaan produk hewan akan mempertimbangkan masukan dan kajian dari Balai Uji Terap dan Teknik Metoda Perkarantinaan Pertanian, serta Balai Besar Uji Standar Karantina Pertanian.
 - e. Kebijakan yang telah disusun oleh Bidang Karantina Produk Hewan akan digunakan oleh pengguna kebijakan dalam hal ini adalah seluruh UPTKP termasuk didalamnya BUTTMKP dan BBUSKP agar dilaksanakan untuk keseragaman pelaksanaan tindakan karantina di tingkat lapangan.
 - f. Asosiasi yang terkait dengan pemasukan dan pengeluaran komoditas sebagai obyek kebijakan (sarang burung walet, daging, makanan ternak, dan lain sebagainya)
 - g. Masyarakat pengguna jasa karantina sebagai pelaku usaha yang akan memanfaatkan pelayanan karantina secara langsung.



Gambar 1. Jejaring Kerja Bidang Karantina Produk Hewan

Strategi komunikasi terhadap pengelolaan sistem informasi monitoring produk hewan dalam rangka optimalisasi penyusunan kebijakan teknis perkarantinaan produk hewan dilakukan dengan menetapkan tujuan komunikasi yaitu agar seluruh *stakeholder* memberikan dukungan terhadap pelaksanaan penyusunan sistem informasi monitoring produk hewan sesuai dengan peran masing-masing untuk mengoptimalkan penyusunan kebijakan teknis perkarantinaan produk hewan dengan memperlancar pelaporan dari UPTKP ke Pusat.

Pihak-pihak terkait dengan proses penyusunan sistem informasi monitoring produk hewan adalah Kepala Pusat Karantina Hewan dan Keamanan Hayati Hewani, Kepala Subbidang Produk Hewan Impor, Kepala Subbidang Produk Hewan Ekspor dan Antar Area, pejabat fungsional, Kepala UPTKP, serta pejabat struktural yang membidangi Karantina Hewan di UPTKP.

Kepala Pusat Karantina Hewan sebagai pengarah dan pengguna perubahan harus memiliki akses khusus terhadap sistem informasi monitoring produk hewan ini. Strategi komunikasi yang harus dilakukan adalah menggunakan komunikasi vertikal dengan teknik berhadapan langsung dan atau tertulis menggunakan nota dinas.

Kepala Subbidang dan pejabat fungsional sebagai tim kerja sebagai penerima manfaat, dapat memberikan masukan dan perbaikan, melakukan pengawasan dan supervisi keberlangsungan sistem yang akan dijalankan serta membantu menyusun program perubahan di tingkat pelaksana, akan diberikan akses khusus untuk di subbidangnya masing-masing, dengan teknik tatap muka langsung, rapat resmi, diskusi, email, sms, telepon, ataupun whatsapp dengan komunikasi vertikal.

Kepala UPT dan seluruh jajarannya yang membidangi Karantina Hewan di UPT dikategorikan sebagai penerima manfaat dapat memberikan masukan dalam rangka perbaikan positif, memberikan laporan data dengan menginputkan ke dalam web, serta melakukan pengawasan dan supervisi terhadap pelaksanaan pelaporan di UPTKP masing-masing, dapat menggunakan metoda tatap muka langsung berdiskusi atau dalam kondisi jarak jauh dengan menggunakan media sosial lainnya dapat menggunakan komunikasi horizontal untuk yang setingkat eselon 3 atau vertikal jika memiliki jabatan yang lebih tinggi, namun bisa menjadi komunikasi diagonal saat memiliki jabatan yang lebih rendah, dengan metoda menggunakan tatap muka atau rapat, atau bahkan menggunakan persuratan resmi maupun media lainnya.

Secara keseluruhan perlu dilakukan pengawasan dan kontrol proses komunikasi dalam rangka penyusunan dan implementasi pelaksanaan pelaporan data dari UPTKP ke Pusat tersebut, untuk menjamin ketepatan dan kecepatan arus data di dalam sistem informasi monitoring produk hewan

D. Manajemen Risiko

Dengan adanya aksi perubahan kinerja organisasi ini, dapat diperhitungkan beberapa potensi masalah yang dapat terjadi selama proses rencana aksi perubahan ini dilaksanakan antara lain sebagai berikut:

1. Adanya resistensi dari UPTKP
2. Kurangnya kompetensi tim kerja dalam mengolah system informasi monitoring produk hewan ini
3. Kurangnya keseriusan tim kerja dalam mengelola system informasi monitoring produk hewan
4. Kurangnya dukungan pimpinan dalam proses penyusunan system informasi monitoring produk hewan

Pengendalian risiko terhadap munculnya potensi masalah agar dapat diantisipasi adalah dengan melakukan perencanaan pengendalian risiko terhadap potensi masalah yang sudah diperkirakan sebagaimana sudah disebutkan di atas. Pengendalian risiko untuk resistensi dari UPT dengan dilakukan sosialisasi terhadap keuntungan dan kemudahan dalam penyampaian laporan ke pusat secara *paperless* dan lebih cepat. Sehingga mengurangi terjadinya kelambatan dan konsumsi bahan dan alat tulis kantor dengan lebih hemat lagi. Kurangnya kompetensi tim kerja dalam mengelola sistem informasi monitoring produk hewan dapat dilakukan dengan penyamaan persepsi dan pelatihan ataupun pendidikan yang mendukung terhadap kegiatan pengelolaan sistem ini secara berkelanjutan.

Kurangnya keseriusan tim kerja dalam mengelola sistem dapat diantisipasi dengan melakukan internalisasi, kontrol secara manajerial, diberikan penghargaan terhadap tim kerja pengelola system. Kurangnya dukungan pimpinan dapat diantisipasi dengan mengkomunikasikan kepada pimpinan terhadap fungsi dan keuntungan dalam penggunaan sistem ini untuk membantu dalam proses pengambilan keputusan/kebijakan terhadap perkarantinaan hewan.

BAB V

PELAKSANAAN AKSI PERUBAHAN

A. Deskripsi Proses Kepemimpinan

1. Membangun Integritas dan Akuntabilitas Kinerja Organisasi

Aksi perubahan kinerja organisasi merupakan sebuah proses perubahan positif dari sebuah organisasi yang memiliki banyak hambatan dalam melaksanakan kinerjanya, menjadi sebuah organisasi yang mampu melaksanakan tugas dan fungsinya dengan lebih baik lagi. Dalam pelaksanaan tugas dan fungsi organisasi dituntut akuntabilitas dalam setiap tahapannya. Bidang Karantina Produk Hewan dituntut untuk dapat mempertanggungjawabkan setiap kegiatan yang telah dilaksanakan, salah satunya adalah kegiatan monitoring produk hewan sebagai salah satu unsur yang penting dalam menyusun kebijakan perkarantinaan produk hewan. Setiap kegiatan monitoring harus dilaporkan dari UPTKP kepada Pusat Karantina Hewan dan Keamanan Hayati Hewani untuk dikaji dan dilakukan respon terutama jika terdapat kejadian yang tidak memenuhi standar yang telah ditetapkan oleh pemerintah. Ini adalah upaya dan tanggung jawab karantina hewan dalam rangka pengamanan terhadap seluruh komoditas produk hewan yang dilalulintaskan di tempat pemasukan dan pengeluaran.

2. Pengelolaan Budaya Kerja (Pemanfaatan IT)

Pelaksanaan monitoring produk hewan yang selama ini hanya dilaksanakan di UPTKP dan dilaporkan secara tertulis dan dilaksanakan detail secara manual, telah selangkah lebih maju dengan memanfaatkan teknologi informasi dengan dibangunnya sebuah sistem informasi yang mengakomodir kepentingan-kepentingan dalam pelaksanaan monitoring produk hewan. Mulai dari pelaporan yang dilaksanakan secara realtime, mudah diakses di mana saja karena memiliki aplikasi berbasis web, hingga adanya notifikasi saat terjadi pelaporan terhadap kejadian yang tidak memenuhi standar yang akan mengancam keamanan dan mutu dari produk hewan yang dilalulintaskan tersebut.

3. Membangun Jejaring dan Kolaborasi

Dengan terbangunnya Sistem Informasi Monitoring Produk Hewan ini merupakan langkah awal dalam Bidang Karantina Produk Hewan untuk dapat membangun jejaring kerja dengan memanfaatkan seluruh stakeholder dan masing-masing kewenangannya untuk dapat mendukung kinerja organisasi, sekaligus juga melakukan kolaborasi dengan seluruh pihak terkait dalam melaksanakan tugas dan fungsi organisasi untuk mencapai yang terbaik. Kolaborasi ini akan dilanjutkan dengan terbukanya sistem yang dibangun untuk bisa memberikan kontribusi dalam pembuatan peta penyakit hewan secara nasional dengan sistem yang dibangun oleh bidang lain.

B. Deskripsi Hasil Kepemimpinan

1. Capaian dalam Perbaikan Kinerja Organisasi

Aksi Perubahan Kinerja Organisasi telah dilaksanakan dengan baik sesuai yang telah direncanakan sebelumnya, dengan hasil yang cukup memuaskan. Hasil utama yang nampak dalam aksi perubahan ini adalah terbangunnya sebuah sistem informasi monitoring produk hewan yang dapat menjembatani antara UPTKP sebagai pelaksana monitoring dengan Pusat sebagai pengendali dan melakukan analisis terhadap kejadian di lapangan untuk kemudian disusun menjadi kebijakan teknis perkarantina produk hewan. Dalam hal perubahan ini, telah menjawab tantangan bahwa dalam melaksanakan pelayanan, karantina juga dituntut kecepatan, dan keakuratan. Dimana SIMPH telah mampu menyajikan data secara *realtime* dan mudah diakses oleh semua pengguna dimanapun berada karena menggunakan web sebagai dasar operasionalnya. Dalam hal terjadi input data terhadap komoditas yang tidak memenuhi standar, maka akan muncul pemberitahuan yang akan dapat segera ditindaklanjuti oleh Kepala Bidang Karantina Produk Hewan dan berkonsultasi kepada Kepala Pusat Karantina Hewan dan Keamanan Hayati Hewani yang juga mendapatkan pemberitahuan yang sama, untuk kemudian diberikan respon berupa kebijakan lebih lanjut dalam menyikapi kejadian tersebut. Dalam melakukan rekapitulasi terhadap data yang terkumpul juga dapat dilakukan dengan lebih cepat sehingga memudahkan dalam mengkompilasi laporan, baik di tingkat UPTKP maupun di tingkat Pusat. Penyimpanan data atau file yang semula memerlukan ruangan atau tempat khusus baik di UPTKP maupun di Pusat, sekarang tidak diperlukan lagi secara fisik karena penyimpanan sekarang menggunakan penyimpanan *cloud* di SIMPH.

2. Manfaat Aksi Perubahan

Manfaat yang didapatkan dengan adanya SIMPH ini adalah tersajinya data monitoring produk hewan dengan lebih *realtime* sehingga bisa menjadi input dalam kebijakan perkarantina produk hewan, yang akhirnya bisa membuat kebijakan yang diambil oleh pimpinan menjadi lebih *up to date/* kekinian. Sehingga hal ini akan meningkatkan keamanan konsumen dalam mendapatkan produk hewan yang aman dan bermutu saat dilalulintaskan melalui tempat pemasukan/pengeluaran.

C. Keberlanjutan Aksi Perubahan

Aksi perubahan kinerja organisasi ini tidak hanya dilaksanakan dalam rangka penyelesaian persyaratan dalam Pendidikan Kepemimpinan Administrator saja, namun lebih jauh lagi, sebagai salah satu lompatan kinerja dari Bidang Karantina Produk Hewan dalam melaksanakan tugas dan fungsinya. Target capaian tahap pertama yang telah didapatkan dalam kurun waktu dua bulan dengan hasil yang cukup memuaskan, akan ditindaklanjuti dengan target capaian tahapan kedua yang akan diselesaikan hingga akhir tahun berupa penambahan jumlah user UPTKP yang semula hanya lima Balai

Besar Karantina Pertanian, menjadi seluruh UPTKP baik Balai Besar, Balai maupun Stasiun Karantina Pertanian sebagai peserta yang turut berperan aktif dalam melakukan monitoring produk hewan dan dilaporkan ke kantor pusat untuk dijadikan bahan penyusunan kebijakan. Serta dilakukan penambahan jenis media pembawa yang akan dilaporkan oleh UPTKP kepada Pusat. Pelaksanaan evaluasi juga selalu dilaksanakan dalam setiap tahapan dalam rangka memastikan segala sesuatu berjalan sebagaimana mestinya. Penambahan konten berupa jenis media pembawa juga akan dilanjutkan pada tahap ketiga di jangka panjang, sekaligus membuka akses terhadap peran serta hasil monitoring sebagai salah satu kontributor dalam pembuatan peta penyakit hewan karantina secara nasional.

BAB VI PENUTUP

Sistem Informasi Monitoring Produk Hewan sebagai wujud aksi perubahan kinerja organisasi ini diharapkan dapat memberikan kontribusi positif yang sangat tinggi dalam mewujudkan tersedianya data dan informasi monitoring produk hewan secara cepat, akurat dan *realtime* dan untuk bisa dimanfaatkan dalam rangka optimalisasi penyusunan kebijakan teknis perkarantinaan hewan di masa datang. Untuk itu diperlukan komitmen unsur pimpinan dan seluruh *stakeholder* dalam mendukung aksi perubahan ini. Diperlukan juga sarana dan prasarana pendukung yang memadai, tim kerja yang solid dan berkomitmen kuat dalam melaksanakan aksi perubahan ini, sehingga perubahan kinerja organisasi menuju kondisi yang lebih baik lagi.

LAMPIRAN

Lampiran 1. Pembuatan tim kerja dan internalisasi



Lampiran 2. Pembuatan surat permintaan usulan personel ke UPTKP

	KEMENTERIAN PERTANIAN BADAN KARANTINA PERTANIAN JALAN HARSONO RM NOMOR 3 RAGUNAN, PASAR MINGGU JAKARTA SELATAN 12550 GEDUNG E Lt. 1, 3, 5 Dan 7 TELEPON/FAKSIMILI (021) 7816484, 7816483, 7816482, 7816481 Website : www.karantina.pertanian.go.id Email : humaskarantina@pertanian.go.id	
Nomor	: 6174 / DT.050 / K.4 / C / 2020	4 Mei 2020
Sifat	: Segera	
Lampiran	: -	
Hal	: Permintaan Nama Ketua Tim Monitoring Produk Hewan	
Yth.		
	1. Kepala BBKP Belawan	
	2. Kepala BBKP Soekarno Hatta	
	3. Kepala BBKP Tanjung Priok	
	4. Kepala BBKP Surabaya	
	5. Kepala BBKP Makassar	
di		
Tempat		
Sehubungan dengan adanya Aksi Perubahan Kinerja Organisasi pengembangan Sistem Informasi Monitoring Produk Hewan (SIMPH) untuk menunjang pelaporan hasil monitoring produk hewan secara <i>real time</i> , dapat disampaikan hal-hal sebagai berikut:		
1. Agar Saudara menyampaikan nama ketua tim monitoring produk hewan untuk dimasukkan sebagai anggota tim Sistem Informasi Monitoring Produk Hewan yang akan dibuat Surat Keputusan Kepala Pusat Karantina Hewan dan Keamanan Hayati Hewani;		
2. Anggota tim dari UPT bertugas melakukan pemantauan terhadap keberlangsungan Sistem Informasi Monitoring Produk Hewan di UPT masing-masing dan melaporkan hasil monitoring produk hewan secara <i>real time</i> melalui SIMPH.		
Demikian disampaikan, atas perhatian dan kerjasamanya diucapkan terima kasih.		
Kepala Pusat Karantina Hewan dan Keamanan Hayati Hewani,		
 drh. Agus Sunanto, MP NIP.196202051992031002		
Tembusan: Kepala Badan Karantina Pertanian		

Lampiran 3. Surat permintaan usulan tim kerja eksternal



**KEMENTERIAN PERTANIAN
BADAN KARANTINA PERTANIAN**

JALAN HARSONO RM NOMOR 3 RAGUNAN, PASAR MINGGU JAKARTA SELATAN 12550
GEDUNG E Lt. 1, 3, 5 Dan 7 TELEPON/FAKSIMILI (021) 7816484, 7816483, 7816482, 7816481
Website : www.karantina.pertanian.go.id
Email : humaskarantina@pertanian.go.id

4 Mei 2020

Nomor : 675/OT.050/K.2/S/2020
Sifat : Segera
Lampiran : -
Hal : Permintaan Anggota Tim Sistem Monitoring Produk Hewan

Yth.
Kepala BKP Kelas II Tanjung Pinang
di
Tempat

Sehubungan dengan adanya Aksi Perubahan Kinerja Organisasi pengembangan Sistem Informasi Monitoring Produk Hewan (SIMP) untuk menunjang pelaporan hasil monitoring produk hewan secara *real time*, agar Saudara menugaskan drh. Purwanto untuk dapat dimasukkan sebagai anggota tim Sistem Informasi Monitoring Produk Hewan yang akan dibuat Surat Keputusan Kepala Pusat Karantina Hewan dan Keamanan Hayati Hewani;

Demikian disampaikan, atas perhatian dan kerjasamanya diucapkan terima kasih.

Kepala Pusat Karantina Hewan dan
Keamanan Hayati Hewani,

drh. Agus Sunanto, MP
NIP. 196202051992031002

Tembusan:
Kepala Badan Karantina Pertanian

Lampiran 4. Surat Keputusan Tim SIMPH



KEMENTERIAN PERTANIAN BADAN KARANTINA PERTANIAN

JALAN HARSONO RM NOMOR 3 RAGUNAN, PASAR MINGGU JAKARTA SELATAN 12550
GEDUNG E Lt. 1, 3, 5 Dan 7 TELEPON/FAKSIMILI (021) 7816484, 7816483, 7816482, 7816481
Website : www.karantina.pertanian.go.id
Email : humaskarantina@pertanian.go.id

SURAT KEPUTUSAN

KEPALA PUSAT KARANTINA HEWAN DAN KEAMANAN HAYATI HEWANI

Nomor : 1351/Kpts / OT.050/K.2/9/2020

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM SISTEM INFORMASI MONITORING PRODUK HEWAN (SIMPH)

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

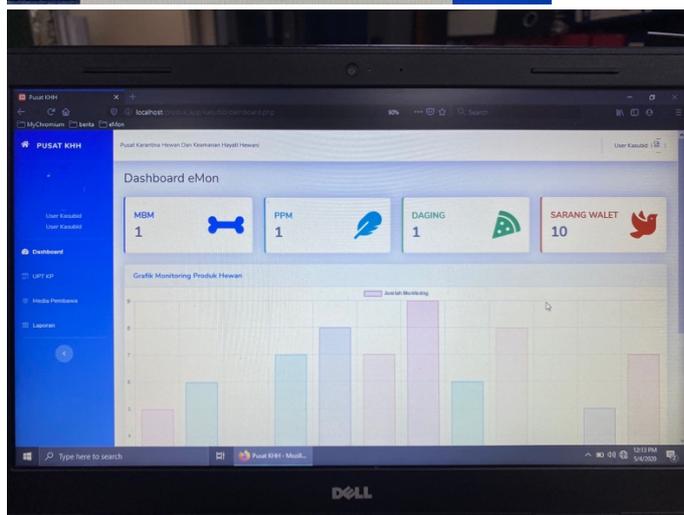
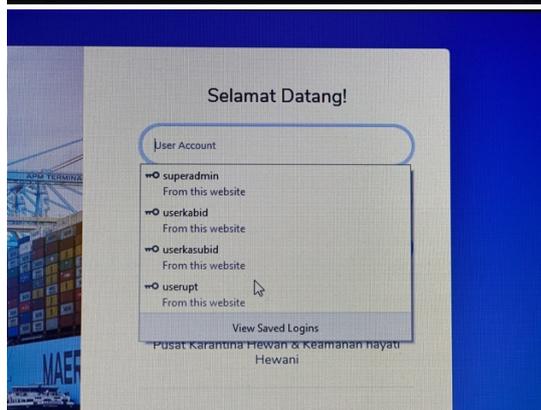
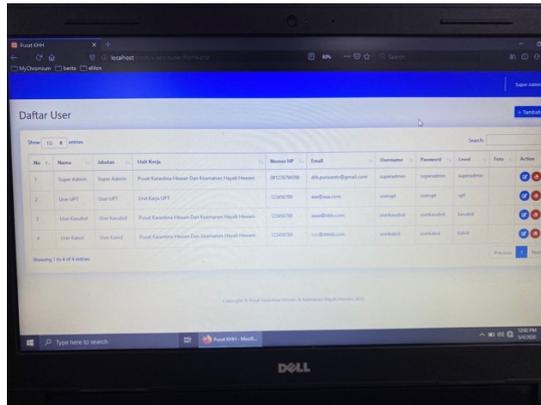
KEPALA PUSAT KARANTINA HEWAN DAN KEAMANAN HAYATI HEWANI

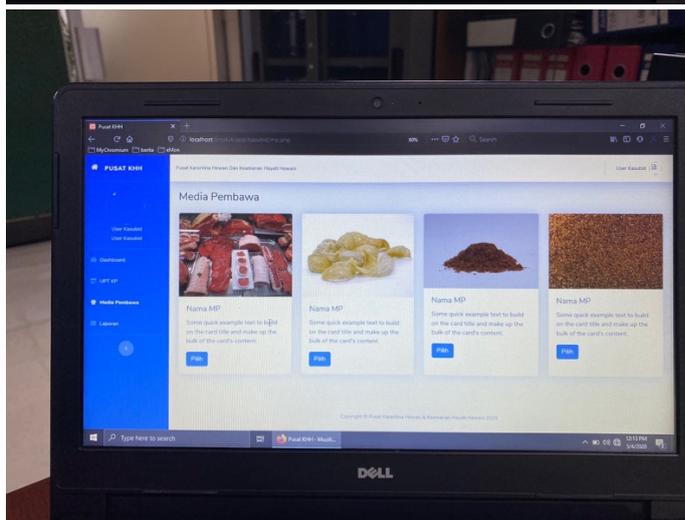
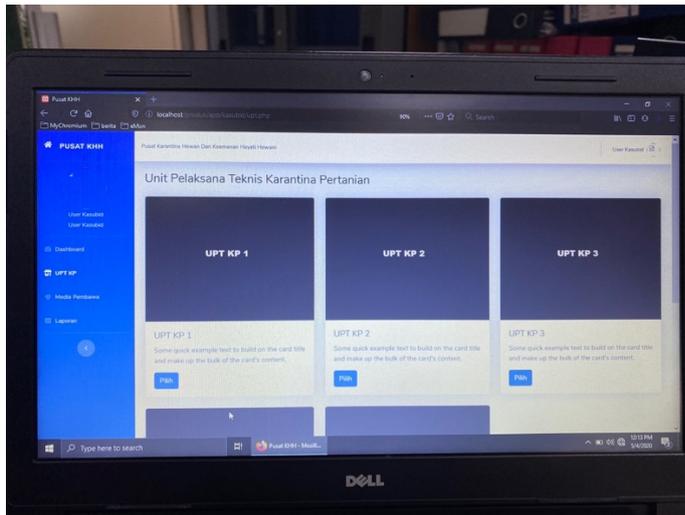
- Menimbang :
- bahwa lalulintas perdagangan produk hewan sangat tinggi dan berisiko mengganggu aspek keamanan pangan sehingga perlu dilakukan monitoring produk hewan dalam rangka menjamin produk yang dilalulintaskan memenuhi aspek keamanan pangan;
 - bahwa monitoring produk hewan yang saat ini dilakukan dalam pelaporannya belum realtime sehingga kebijakan yang diambil tidak dapat diputuskan dengan cepat;
 - bahwa sesuai pertimbangan sebagaimana huruf a dan b, perlu ditetapkan Tim Sistem Informasi Monitoring Produk Hewan (SIMPH);
- Mengingat :
- Peraturan Menteri Pertanian Nomor 43/Permentan/OT.010/8/2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pertanian.
 - Keputusan Kepala Badan Karantina Pertanian Nomor 2464/Kpts/KR.120/K/11/2018 tentang Pedoman Monitoring Terhadap Bahan Asal Hewan dan Hasil Bahan Asal Hewan;

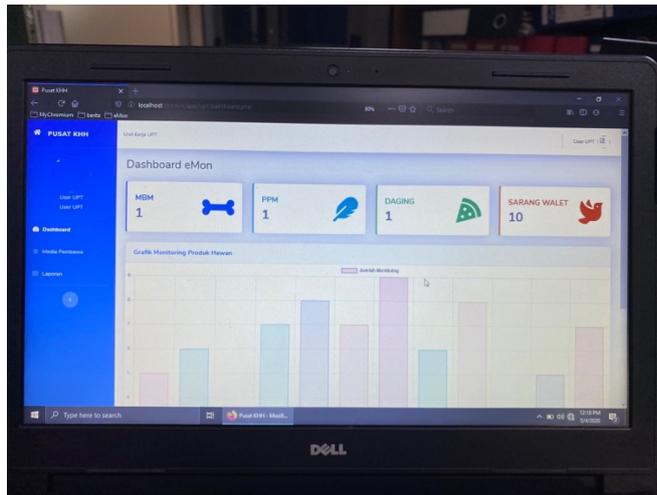
MEMUTUSKAN

- Menetapkan :
- Kesatu : Menetapkan nama yang tersebut dalam Lampiran 1 keputusan ini sebagai tim Sistem Informasi Monitoring Produk Hewan;

Lampiran 5. Perancangan dan Penyusunan







1. Sudah kiman interface.

pembuat user → super admin.

User pusat & UPT.

Kasub → dekl. → Medik / PM.

Kabid → ex.c sum. + dekl.

Kapus ex.c.

Mei sdu. operasional.

Mei ke 3 Mei sdu operasional.

Mei ke 4 uji coba. sekaligus

Jun awal. → ~~open~~ soft launching.

Lampiran 6. Uji Coba



Lampiran 7. Sosialisasi ke UPTKP (User)



KEMENTERIAN PERTANIAN BADAN KARANTINA PERTANIAN

JALAN HARSONO RM NOMOR 3 RAGUNAN, PASAR MINGGU JAKARTA SELATAN 12550
GEDUNG E LL 1, 3, 5 Dan 7 TELEPON/FAKSIMILI (021) 7816484, 7816483, 7816482, 7816481
Website : www.karantina.pertanian.go.id
Email : humaskarantina@pertanian.go.id

8 Juni 2020

Nomor : 7456 / TU. 020 / K. 2 / 6 / 2020
Sifat : Biasa
Lampiran : -
Hal : Undangan Bimtek Sistem Informasi Monitoring Produk Hewan (SIMPH)

Yth.
(Daftar Undangan Terlampir)
di
Tempat

Berkenaan dengan adanya pengembangan Sistem Informasi Monitoring Produk Hewan (SIMPH) untuk menunjang pelaporan hasil monitoring produk hewan secara *real time*, Pusat Karantina Hewan dan Keamanan Hayati Hewani akan mengadakan bimbingan teknis terkait pemanfaatan Sistem Informasi Monitoring Produk Hewan. Sehubungan hal tersebut dimohon agar Kepala UPTKP pada lampiran 1 menugaskan Kepala Bidang KH beserta Tim Monitoring Produk Hewan dan Saudara pada Lampiran 2, untuk hadir pada kegiatan secara daring yang akan dilaksanakan pada:

hari/tanggal : Kamis/11 Juni 2020
waktu : 09.00 WIB s/d selesai

Demi kelancaran *teleconference*, dimohon Saudara mengunduh Aplikasi Zoom melalui PC dengan alamat (<https://zoom.us/support/download>) atau menggunakan **Android** melalui Google Play (<https://play.google.com/store/apps/details?id=us.zoom.videomeetings>), dengan memasukkan Meeting ID dan Password yang akan diinformasikan kemudian melalui WhatsApp.

Untuk mengantisipasi adanya kendala pada Aplikasi Zoom, diharapkan Bapak/Ibu sudah mempersiapkan diri minimal 30 menit sebelum rapat dimulai.

Demikian dapat disampaikan, atas perhatian dan kehadirannya diucapkan terimakasih.



Kepala Pusat Karantina Hewan dan
Keamanan Hayati Hewani,

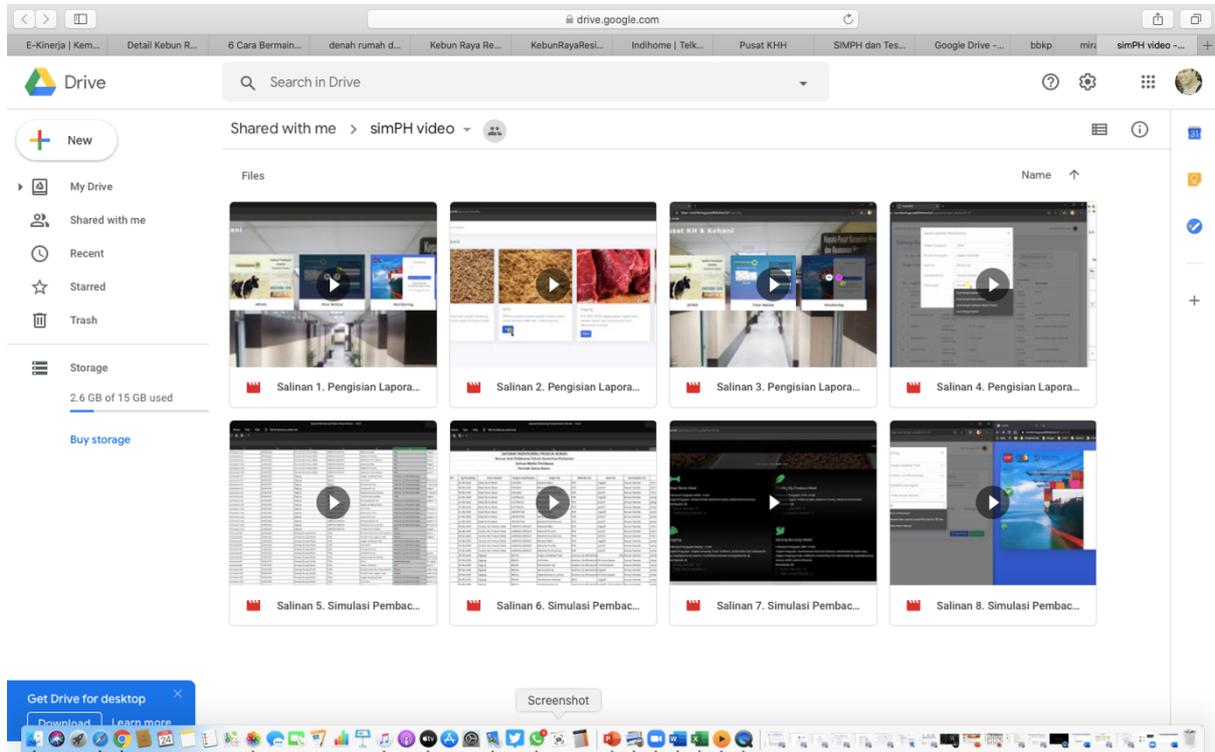
drh. Agus Sunanto MP
NIP 196202051992031002

Tembusan:
Kepala Badan Karantina Pertanian

Lampiran 8. Konsultasi Pimpinan



Lampiran 9. Panduan Pengguna (User Guide)



Lampiran 10. Pelaksanaan

